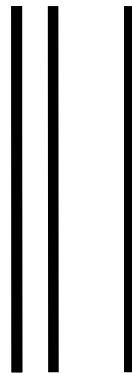




RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



**DINAS PARIWISATA
KOTA YOGYAKARTA**

TAHUN 2017 - 2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Peluang
 - 2.4.2 Tantangan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3.3.1 Telaahan Renstra K/L
 - 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor: 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana PD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra PD untuk periode lima tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2017-2022, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta harus menyusun Renstra PD periode tahun 2017-2022 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2017-2022. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2022. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merancang Renstra PD secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Rencana Strategis, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Kota Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2007 No. 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125)
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
 16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kota Yogyakarta Tahun 2001-2030 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 16);
 17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025;
 18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor: 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
 21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2017-2022 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta bagi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2017–2022. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kota Yogyakarta, RIPPARDA Kota Yogyakarta, dan RPJMD Kota Yogyakarta yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Yogyakarta ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2017-2022, beserta program prioritas dengan berpedoman pada RIPPARDA (2012-2025) dan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2017-2022;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2017-2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bagian utama, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kab./ kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra PD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

4.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

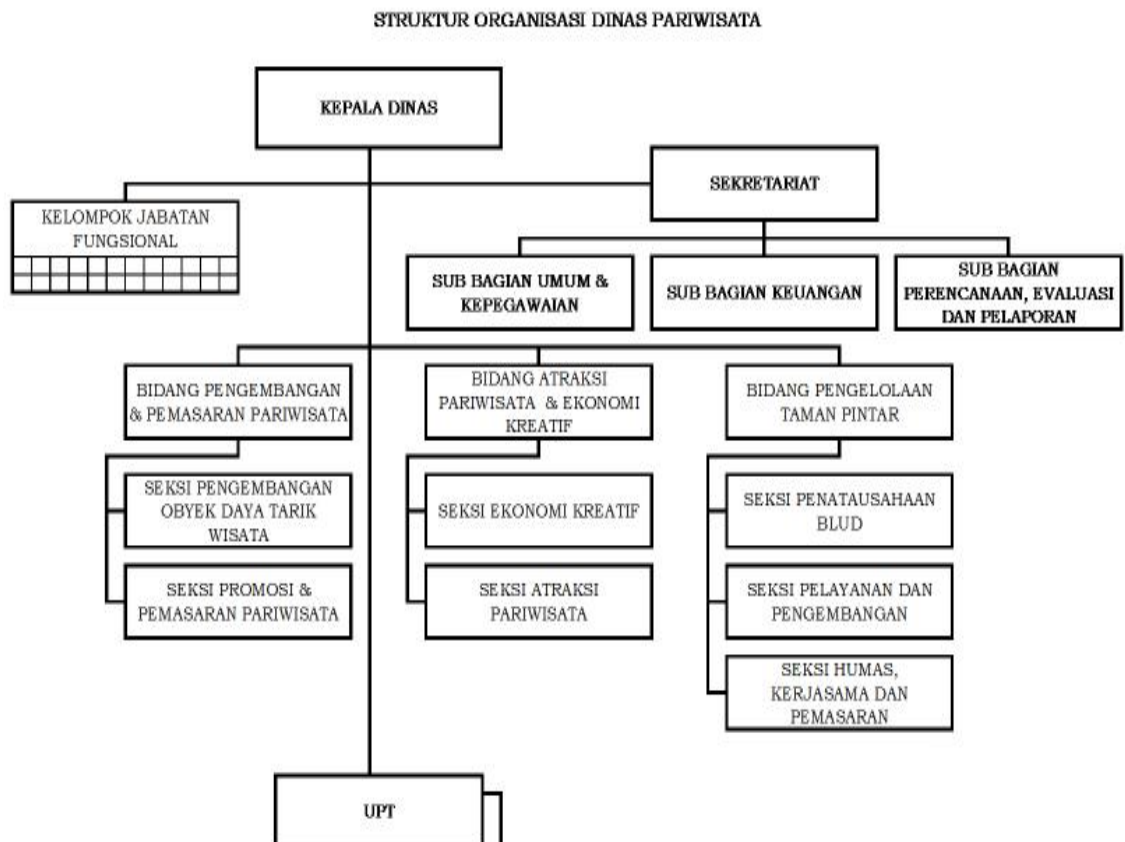
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pariwisata;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- e. Pengelolaan Taman Pintar dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
- f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata;

Adapun Susunan Organisasi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

(berdasar Perwal No. 81 tahun 2016)



1. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, serta fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang pariwisata;
 - d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
 - e. pengkoordinasian pengelolaan taman pintar dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
 - f. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

- g. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan, serta fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata, serta fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata;
 - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata;
 - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata.
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
4. Bidang Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dibidang atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - b. Seksi Atraksi Pariwisata.
5. Bidang Pengelolaan Taman Pintar dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pengelolaan Taman Pintar, serta fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan Taman Pintar;
 - b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengelolaan Taman Pintar;
 - c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pengelolaan Taman Pintar;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pengelolaan Taman Pintar;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD); dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pengelolaan Taman Pintar.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Seksi Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Seksi Pelayanan dan Pengembangan.
- c. Seksi Humas, Kerjasama dan Pemasaran.

4.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

4.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sampai akhir tahun 2017 sebanyak 33 orang PNS, yang terdiri atas pejabat struktural sebanyak 15 orang dan pejabat fungsional umum sebanyak 18 orang. Personil Non PNS yang terdiri dari 3 orang tenaga bantuan (naban) dan Non PNS Taman Pintar sebanyak 90 orang.

Pejabat struktural meliputi:

- 1) Pejabat eselon II : -
- 2) Pejabat eselon III : 3 orang
- 3) Pejabat eselon IV : 12 orang

Jika dilihat dari jenjang pendidikan formal, jumlah personil PNS yang ada di Dinas Pariwisata sebagai berikut:

- 1) Pasca Sarjana : 7 orang
- 2) Sarjana : 13 orang
- 3) D4 : -
- 4) D III : 7 orang
- 5) D II/I : -
- 6) SLTA sederajat : 5 orang
- 7) SLTP : 1 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan

- 1) Pembina Utama (IV/d) : -
- 2) Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
- 3) Pembina (IV/a) : 4 orang
- 4) Penata Tingkat I (III/d) : 8 orang
- 5) Penata (III/c) : 5 orang
- 6) Penata Muda Tk. I (III/b) : 5 orang
- 7) Penata Muda (III/a) : 4 orang
- 8) Pengatur Tk.I (II/d) : 1 orang

- 9) Pengatur (II/c) : 5 orang
- 10) Pengatur Muda Tk. I (II/b) : -
- 11) Pengatur Muda (II/a) : -

4.2.2. SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi:

a) Gedung Kantor

Prasarana gedung kantor yang ditempati oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

b) Jaringan Internet dan Telepon PABX

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari kantor Dinas Pariwisata telah disambungkan dengan fasilitas komunikasi yang berupa sambungan telepon PABX sejumlah 6 (enam) titik sambungan yang menghubungkan antar ruangan dan antar bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Pariwisata, dan 1 (satu) sambungan SLJJ, sedangkan untuk keperluan komunikasi dengan berbagai pihak yang membutuhkan data/informasi melalui jaringan internet maupun intranet telah disambungkan jaringan internet sebanyak 13 (tiga belas) titik sambungan *desk top* dan 2 (dua) titik *hot-spot*.

c) Meubelair

Jenis meubelair minimal dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi sehari-hari berupa meja-kursi kerja sebanyak jumlah personil yang ada di Dinas Pariwisata, meja komputer, almari, *filling cabinet*, meja-kursi rapat, dan meja-kursi tamu.

d) Komputer/Mesin Ketik

Jumlah komputer yang dimiliki untuk mendukung tugas dan fungsi ada 13 unit, printer 6 (enam) unit, scanner 2 (dua) unit dan jumlah mesin ketik manual sebanyak 2 (dua) buah dengan kondisi rusak sehingga seringkali memerlukan perawatan.

e) Sarana mobilitas

Mengingat tugas dan fungsinya berupa rapat koordinasi dengan instansi lain baik di tingkat pemerintah kota maupun provinsi, serta operasional teknis kegiatan, maka diperlukan sarana transportasi berupa kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat) dan roda 6 (enam). Kendaraan roda 2 (dua) yang dimiliki sebanyak 10 (sepuluh) unit, roda 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) unit, roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit dan roda 6 (enam) sebanyak 1 unit.

4.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang sudah tertera dalam RPJMD Kota Yogyakarta (2012-2016), dan diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampau. Harapan ini dimungkinkan terealisasi, jikalau terwujud kondisi Kota Yogyakarta aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas *stakeholder* pariwisata maupun masyarakat Kota Yogyakarta berjalan baik dan lancar.

Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2012-2016 urusan kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada periode Renstra tersebut untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, dengan 4 (empat) indikator program yaitu:

- a. Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder
- b. Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder
- c. Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata
- d. Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%

Data yang tertuang dalam Tabel 2.1. menunjukkan bahwa sasaran dan semua indikator program dapat tercapai sesuai target di tiap tahunnya (2012-2016), hal ini menunjukkan tidak ada masalah signifikan yang menghambat pencapaian untuk ke empat program tersebut. Pada kolom rasio capaian, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator pada setiap tahunnya sangat tinggi (100%), pada satu sisi ini menggambarkan berhasilnya layanan/langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk menjalankan program yang telah ditentukan, tetapi di sisi lain perlu dilakukan analisa akan penetapan target pada Renstra. Dimana perlu ditentukan target yang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan SDM untuk menjalankan program tersebut, sehingga target yang ditetapkan lebih terukur.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian dalam Renstra 2012-2016, diantaranya adalah:

- a. Kondisi Kota Yogyakarta yang kondusif bagi kunjungan wisatawan baik wisnus maupun wisman;
- b. Citra Kota Yogyakarta yang positif sebagai tujuan wisata favorit di tingkat nasional, regional dan internasional.

- c. Hubungan baik antara Dinas Pariwisata dan para stakeholder pariwisata di Kota Yogyakarta untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;
- d. Semakin banyak bermunculan destinasi dan atraksi wisata baru di Kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya;
- e. Semakin meningkatnya layanan dan sadar wisata para pelaku usaha jasa pariwisata;
- f. Semakin meningkatnya sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta.

Pendanaan (anggaran) bagi program dan kegiatan urusan pariwisata, dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Data yang disampaikan pada tabel tersebut menunjukkan anggaran, realisasi, rasio antara realisasi dan anggaran dan rata-rata pertumbuhan. Pada kolom rasio antara realisasi dan anggaran dapat diketahui bahwa dalam periode Renstra 2012-2016 ada program di tahun tertentu yang rasio realisasinya di bawah 80%.

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata pada tahun 2013-2016 rasio realisasinya di bawah 80%, dimana rasio realisasi terendah pada tahun 2013 hanya 56,69%. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada tahun 2015 realisasinya di bawah 80%. Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata pada tahun 2014 realisasinya di bawah 80%.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Yogyakarta

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
	Indikator Sasaran:																		
	Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan				2.600.000 orang	2.704.000 orang	2.812.160 orang	2.924.646 orang	3.041.632 orang	2.895.180 orang	2.715.471 orang	3.007.253 orang	3.250.681 orang	3.261.748 orang	111.35%	100.42%	106.94%	111.15%	107.24%
	Indikator Program:																		
	Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan				3 daerah pasar wisata potensial	3 daerah pasar wisata potensial	3 daerah pasar wisata potensial	3 daerah pasar wisata potensial	3 daerah pasar wisata potensial	7 daerah pasar wisata potensial	4 daerah pasar wisata potensial	4 daerah pasar wisata potensial	6 daerah pasar wisata potensial	7 daerah pasar wisata potensial	233.33%	133.33%	133.33%	200.00%	233.33%

	stakeholder																		
	Indikator Program:																		
	Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder				1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dengan stakeholder	2 daerah kerjasama, 3 Jejaring kerja dengan stakeholder	2 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dengan stakeholder	3 daerah kerjasama, 1 Jejaring kerja dengan stakeholder	5 daerah kerjasama, 3 Jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama, 2 Jejaring kerja dengan stakeholder	250.00%	150.00%	200.00%	400.00%	150.00%
	Indikator Program:																		
	Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata				1 odtw	1 odtw	1 odtw	1 odtw	1 odtw	1 odtw	1 odtw	1 odtw	1 odtw	1 odtw	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Indikator Program:																		
	Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%				72.00%	74.00%	76.00%	78.00%	80.00%	72.58%	73.87%	76.77%	79.70%	82.30%	100.81%	99.82%	101.01%	102.18%	102.88%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata
Kota Yogyakarta

Uraian**)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	1,654,607,000	1,795,181,750	2,132,029,800	2,203,501,587	3,940,357,630	1,360,810,450	1,017,738,005	1,574,122,454	1,676,086,169.50	2,785,333,787	82.24%	56.69%	73.83%	76.06%	70.69%	27.36%	25.53%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3,204,756,750	4,206,518,686	7,760,301,937	8,390,161,267	7,888,732,786	2,785,434,947	3,510,628,318	6,841,140,602	6,702,935,549	6,760,147,212	86.92%	83.46%	88.16%	79.89%	85.69%	29.47%	29.93%
Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	451,290,000	314,398,000	561,675,500	718,144,500	960,487,450	432,955,400	263,896,550	423,728,610	589,475,246	816,383,626	95.94%	83.94%	75.44%	82.08%	85.00%	27.48%	24.78%

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran program dalam periode Renstra 2012-2016, diantaranya adalah:

- a. Kebijakan pimpinan Perangkat Daerah dalam menjalankan program, khususnya terkait sumber pendanaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan dan APBD.
- b. Mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang memperhatikan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
- c. SDM yang terbatas, baik secara kuantitas dan kualitas.
- d. Proses pelaksanaan program yang belum berjalan sebagaimana mestinya karena faktor eksternal dan internal.

4.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan seluruh *stakeholder* dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataaan.

4.4.1. Peluang

- a. Berkembangnya usaha pariwisata di Indonesia maupun di Kota Yogyakarta yang begitu pesat dan menjanjikan, dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Yogyakarta baik budaya, sejarah, pendidikan, kuliner, dan belanja yang khas/unik memiliki daya saing yang tinggi dengan daerah di luar Kota Yogyakarta.
- c. Ditetapkannya kebudayaan sebagai dasar pembangunan dan pengembangan segala aspek kehidupan, termasuk pada sektor kepariwisataan Kota Yogyakarta.
- d. Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Yogyakarta semakin meningkat.
- e. Kepedulian dunia pendidikan (terutama Perguruan Tinggi) yang cukup tinggi dalam mendukung kepariwisataan Kota Yogyakarta.
- f. Sarana prasarana, SDM pariwisata Kota Yogyakarta dan berbagai fasilitas pendukung/penunjang yang memadai.
- g. Situasi keamanan dan nyaman Kota Yogyakarta yang cukup kondusif.
- h. Berkembang pesatnya produk-produk (barang dan jasa) sebagai penunjang/pendukung kepariwisataan Kota Yogyakarta.
- i. Kredibilitas dan citra kepariwisataan Kota Yogyakarta yang baik, bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.
- j. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kota Yogyakarta.

- k. Perkembangan sarana prasarana transportasi, khususnya akan beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan mempermudah dan memperluas akses ke DIY melalui sarana transportasi udara.
- l. Perkembangan Kampung Wisata sebagai destinasi wisata alternatif bagi wisatawan, sehingga akan memperkaya pilihan destinasi wisata di Kota Yogyakarta.
- m. Ketersediaan berbagai sarana prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan perkembangan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*).
- n. Ketersediaan sarana prasarana amenities (hotel, restoran, dsb.) dan aksesibilitas yang memadai ke destinasi wisata di sekitar Kota Yogyakarta, membuka peluang Kota Yogyakarta sebagai *hub* bagi wisatawan yang berkunjung ke DIY.
- o. Pengembangan atraksi pariwisata di waktu malam, yang dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di Kota Yogyakarta.
- p. Pengembangan destinasi wisata baru di wilayah selatan Kota Yogyakarta, yang dapat menjadi daya tarik wisata, dan mengembangkan tingkat perekonomian di wilayah selatan Kota Yogyakarta.

4.4.2. Tantangan

- a. Berkembang dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata di luar Kota Yogyakarta dapat menjadi pesaing/kompetitor.
- b. Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Yogyakarta baik budaya, sejarah, pendidikan, kuliner, dan belanja yang berdaya saing perlu ditingkatkan kualitasnya (terstandarisasi).
- c. Atraksi seni budaya sebagai daya tarik wisata di seluruh destinasi pariwisata Kota Yogyakarta, secara kualitas dan kuantitas perlu untuk ditingkatkan.
- d. Pemahaman dan penerapan Sapta Pesona, serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Yogyakarta yang masih perlu ditingkatkan.
- e. Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri, dan implementasi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) tahun 2015 yang mengharuskan kepariwisataan Kota Yogyakarta punya daya saing tinggi dan berstandar internasional.
- f. Beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan membuka dan mempermudah akses ke destinasi wisata di sekitar DIY, seperti Candi Borobudur di Magelang, dsb.
- g. Sektor pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian Kota Yogyakarta, belum dirasakan kemanfaatannya secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta.

- h. Perilaku sebagian pelaku usaha pariwisata yang masih mementingkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan citra pariwisata Kota Yogyakarta ke depannya.
- i. Pengelolaan Kawawan Malioboro sebagai titik strategis pariwisata Kota Yogyakarta belum optimal.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait SDM dan Sarana Prasarana Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang dapat menghambat tugas dan fungsi pelayanan Paerangkat Daerah:

- 1) Kuantitas sumber daya manusia/pegawai belum proporsional dengan beban kerja, dan tingkat kemampuan teknis/ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugas belum memadai, dalam hal ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen serta kemampuan berbahasa asing;
- 2) Kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan;
- 3) Kuantitas SDM yang terbatas untuk menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
- 4) Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan percepatan;
- 5) Kendaraan roda 4 dan 2 masih terbatas, dan sebagian dalam kondisi rusak sehingga tidak seluruh kendaraan dinas bisa digunakan secara optimal;
- 6) Masih terbatasnya meubelair khususnya kursi dan meja rapat;
- 7) Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag masih kurang, dan belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah :

“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan“

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat
- 3) Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
- 4) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman
- 7) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada misi kedua yaitu “Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat“, dengan sasaran daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana peran Dinas Pariwisata dalam mewujudkan sasaran ini dengan melakukan program pengembangan dan pemasaran pariwisata, program pengembangan Taman Pintar dan program peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif. Program-program ini ditujukan untuk mendukung misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dimana dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata (meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal) maka akan memberikan dampak/efek peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Kota Yogyakarta.

Faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

- 1) Sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya belum berkualitas/berstandar pelayanan prima.
- 2) Kualitas dan kuantitas fasilitas umum pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, dll.) yang belum memadai.
- 3) Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun ke luar negeri (masih banyak tergantung Jakarta dan Bali).
- 4) Belum optimalnya promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri.
- 5) Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama yang terpadu bagi seluruh *stakeholder* pariwisata Kota Yogyakarta.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan pemasaran/promosi pariwisata minat khusus, tematik dan segmen tertentu.

- 7) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan informasi, dalam salah satu strategi promosi dan pemasaran pariwisata Kota Yogyakarta
- 8) Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya.
- 9) Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan
- 10) Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan *sapta pesona* oleh *stakeholder* kepariwisataan, pelaku pariwisata maupun masyarakat.
- 11) Belum optimalnya sinergi antar instansi (Perangkat Daerah) yang menangani ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta.
- 12) Belum optimalnya fasilitasi bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk berekspresi dalam menguatkan pariwisata Kota Yogyakarta
- 13) Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, dsb.) yang ada di Kota Yogyakarta.
- 14) Belum meratanya pementasan atraksi wisata di titik-titik strategis pariwisata Kota Yogyakarta.
- 15) Perlunya penguatan atraksi pariwisata berbasis budaya khas Yogyakarta sebagai keunikan atraksi pariwisata di Kota Yogyakarta.
- 16) Belum optimalnya fungsi pengiriman misi kesenian sebagai sarana promosi pariwisata Kota Yogyakarta
- 17) Masih minimnya atraksi pariwisata yang diselenggarakan di malam hari, sebagai daya tarik pariwisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.
- 18) Bentuk kelembagaan Taman Pintar yang memakai tata kelola keuangan dengan mekanisme BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), memiliki *core business* dan pengelolaan yang berbeda dengan Dinas Pariwisata.
- 19) Minimnya area parkir di sekitar Taman Pintar yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi wisatawan yang akan berkunjung.
- 20) Kemacetan lalu lintas di saat liburan dan *peak season* di sekitar Taman Pintar.
- 21) Belum optimalnya pengembangan konten yang menjadi daya tarik utama Taman Pintar.
- 22) Terbatasnya luasan area Taman Pintar yang membatasi penambahan dan pengembangan konten yang memerlukan area yang cukup luas.
- 23) Belum meratanya distribusi kunjungan dalam satu tahun, yang berdampak pada padatnya kunjungan di hari-hari tertentu yang mengurangi kenyamanan pengunjung.

Faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1) Tumbuh dan berkembangnya usaha pariwisata di Kota Yogyakarta, yang meningkatkan amenitas pariwisata.
- 2) Ketersediaan berbagai sarana prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan perkembangan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
- 3) Tumbuh dan berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di bidang pariwisata, yang menyediakan berbagai produk dan jasa yang menarik minat wisatawan.
- 4) Semakin meningkatnya sadar wisata di kalangan masyarakat.
- 5) Semakin berkembangnya kampung-kampung wisata sebagai CBT (*Communtiy Based Tourism*) yang menyediakan alternatif wisata di Kota Yogyakarta.
- 6) Citra Kota Yogyakarta yang nyaman dan kondusif sebagai tujuan wisata.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Renstra Kementerian Pariwisata RI 2015 – 2019

Visi :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengandengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif; dan
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

No	Sasaran Renstra K/L	Keterkaitan PD dengan sasaran PD terkait dengan sasaran Renstra K/L	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	Sebagian besar destinasi wisata dikelola oleh swasta atau pribadi, sehingga berdampak pada keleluasaan penerapan kebijakan	Sesuai tupoksi
2	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	Belum dirasakannya secara luas peningkatan investasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat	-

No	Sasaran Renstra K/L	Keterkaitan PD dengan sasaran PD terkait dengan sasaran Renstra K/L	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	Sebagian SDM lokal (Kota Yogyakarta) kualitasnya belum memenuhi standar pendidikan/keterampilan yang dibutuhkan	-
4	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	-	-
5	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	Kualitas layanan berstandar internasional bagi wisman yang belum merata	Sesuai tupoksi
6	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	-	-
7	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	Kemacetan dan padatnya transportasi saat waktu <i>peak season</i>	Sesuai tupoksi
8	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	-	-
9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata	Banyak pelaku pariwisata belum profesional dalam melayani wisatawan, dan belum menerapkan <i>sapta pesona</i>	Sesuai tupoksi

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata DIY

Renstra Dinas Pariwisata DI Yogyakarta 2012-2017

Visi :

“Terwujudnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi terkemuka di Asia tenggara pada tahun 2025 berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan menjadi salahsatu pendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan”

Misi :

- a. mewujudkan Kepariwisataan berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
- b. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya;

- c. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- d. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- f. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- g. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;
- h. mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
- i. mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

Tujuan:

- a. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan;
- c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara;
- e. mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Sasaran Strategis:

- a. terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata;

- b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata;
- d. meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah;
- f. terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- g. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- i. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- j. terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. terwujudnya lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- l. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
- m. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional; dan
- n. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

No	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata DIY	Keterkaitan PD dengan sasaran PD terkait dengan sasaran Renstra Dinas Pariwisata DIY	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	terciptanya berbagai inovasi jenis Daya Tarik Wisata	Keterbatasan dalam pengelolaan berbagai daya tarik wisata dengan perbedaan kepemilikan	Sesuai tupoksi
2	tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal	Terbatasnya kemampuan menyediakan fasilitas yang berstandar handal (internasional)	-
3	meningkatnya kualitas paket Wisata yang variatif, yang	Belum terbentuknya forum komunikasi yang sinergis	Sesuai tupoksi

	dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku Wisata	dengan berbagai <i>stakeholder</i> pariwisata	
4	meningkatnya kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara	Citra negatif sebagian oknum pelaku pariwisata	Sesuai tupoksi
5	meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah	-	-
6	terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah	-	Sesuai tupoksi
7	meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan	Semakin bermunculan kompetitor destinasi wisata dengan standar kualitas yang baik	Sesuai tupoksi
8	meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan	-	-
9	terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	-	Sesuai tupoksi

10	terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien	Belum sinerginya kelembagaan pariwisata yang dapat mengelola berbagai stakeholder pariwisata dengan profesional, efektif dan efisien	Sesuai tupoksi
11	terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah	-	Sesuai tupoksi
12	terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional	Belum banyaknya pelatihan dan pendidikan unruk meningkatkan kualitas SDM	Sesuai tupoksi
13	terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona	Masih banyak masyarakat /pelaku pariwisata yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek, yang berdampak negatif terhadap citra Kota Yogyakarta secara keseluruhan	Sesuai tupoksi

Hasil Analisis terhadap Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata DI Yogyakarta adalah :

- Renstra Kementerian Pariwisata RI merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah;
- Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata DIY secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
- Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta secara langsung merupakan refleksi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Yogyakarta tahun 2015-2025;

- Untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk program dan kegiatan, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta akan selalu bersinegi dengan Kementerian Pariwisata RI dan Dinas Pariwisata DIY;
- Jadi keberadaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata DIY, dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahannya ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata

Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha

pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil Telaahan RTRW terkait Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Yogyakarta yang telah disusun sedemikian rupa, maka program dan kegiatan yang terkait pengembangan destinasi wisata diarahkan pada kluster kawasan pariwisata yang telah ditentukan, seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya. Kawasan-kawasan tersebut menjadi prioritas dilakukannya berbagai program dan kegiatan kepariwisataan, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan di kawasan/wilayah lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam

mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan, sehingga tidak akan mempunyai pengaruh dampak negatif besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah: Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap

menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Hasil Kajian KLHS terkait Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Berdasar kajian KLHS yang telah disampaikan, maka program pengembangan dan pemasaran pariwisata yang terkait dengan Dinas Pariwisata yaitu kebijakan dalam

manajemen destinasi wisata harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini manajemen destinasi wisata memperhatikan penanganan sampah dan limbah, pencemaran lingkungan, dan berbagai hal lain yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan di sekitar destinasi wisata tersebut.

Beberapa hal lain yang terkait program pengembangan dan pemasaran pariwisata yang terkait KLHS, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama dengan berbagai institusi/dinas di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun *stakeholder* pariwisata lainnya baik dari pelaku usaha jasa pariwisata maupun komunitas dan masyarakat di Kota Yogyakarta.

3.5 Isu-isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Peran Dinas Pariwisata khususnya terkait pada isu strategis kesenjangan ekonomi, karena saat ini sektor pariwisata menjadi penggerak perekonomian yang sangat penting bagi Kota Yogyakarta. Tumbuhnya berbagai usaha jasa pariwisata dan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, seharusnya dapat menjadi pendorong perekonomian di Kota Yogyakarta, sehingga *gap* kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir.

Beberapa isu strategis di Dinas Pariwisata setelah dilakukan beberapa identifikasi dan telaah baik secara internal maupun yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata), Dinas Pariwisata DIY, RTRW dan KLHS sebagai berikut.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal.
2. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, dsb. sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.
3. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri.
4. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
5. Penguatan sapa pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat Kota Yogyakarta.
6. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata Kota Yogyakarta.

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi pariwisata yang tersebar di titik-titik strategis kawasan pariwisata.
8. Pengembangan destinasi wisata yang merata di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga dapat memecah kepadatan wisatawan dan mengembangkan potensi pariwisata di wilayah yang kepariwisataannya belum berkembang optimal.
9. Sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Penta Helix), yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sesuai dengan Dokumen RPJMD (2017-2022) dan Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai perwujudan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta”, dengan sasaran daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Strategi daerah dalam mewujudkan sasaran daerah dengan pengembangan dan pemasaran pariwisata, pengembangan Taman Pintar dan peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif. Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah, sasaran daerah dan strategi daerah menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
2	Lama tinggal wisatawan meningkat	Lama tinggal wisatawan meningkat	Length of Stay(LoS)	2,02 hari	2,04 hari	2,06 hari	2,08 hari	2,1 hari

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan. Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan			
Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
			Meningkatkan pembinaan kampung wisata
			Meningkatkan wisata sejarah
			Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Malioboro
			Pengembangan Taman Pintar
Lama tinggal wisatawan meningkat	Lama tinggal wisatawan meningkat	Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan operasional layanan Taman Pintar
			Mengembangkan <i>science center</i> di kawasan selatan
			Meningkatkan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif
			Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata
			Meningkatkan pengembangan atraksi pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pariwisata melaksanakan satu urusan pilihan yaitu Urusan Pariwisata Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan mejadi 3 program yaitu:

1. Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pembinaan Taman Pintar, dan
3. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rencana Program dan Kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata
Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2 (2019)		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,802,340,208	100%	1,856,410,414	100%	1,912,102,727	100%	1,969,465,808	100%	2,028,549,783	100%	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
		018	Kegiatan Penyediaan	Makan minum harian karyawan	242 kali	34 orang	1,389,130,000	34 orang	1,430,803,900	34 orang	1,473,728,017	34 orang	1,517,939,858	34 orang	1,563,478,053			

				Rapat-rapat	Makan minum tamu	58 kali	24 kali		24 kali		24 kali		24 kali				
				Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum rapat	100 kali	50 kali		50 kali		50 kali		50 kali				
					Langganan Telepon Dinas		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
					Langganan Telepon UPT		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
					Bantuan biaya komunikasi Kepala		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
					Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan				
					Perjalanan Dinas luar daerah dalam propinsi	6 laporan	-		-		-		-				
					Perjalanan Dinas luar daerah luar propinsi	9 laporan	-		-		-		-				
					Konsultasi ke Jakarta	4 laporan	-		-		-		-				
			01		Kegiatan	materai 6000-an	100 buah	100 buah	339,3	100 buah	349,5	100 buah	360,0	100 buah	370,8	100 buah	381,9

			9	Penyediaan			76,25		57,53		44,26		45,59		70,95			
				Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	materai 3000-an	400 buah	400 buah		400 buah		400 buah		400 buah		400 buah			
					STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya	3 unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit			
					STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya	1 unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
					STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya	8 unit	8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit			
					Jasa Cleaning Service	1 paket	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
					Bahan kebersihan	14 jenis	14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis			
					Alat Tulis Kantor Dinas	49 jenis	49 jenis		49 jenis		49 jenis		49 jenis		49 jenis			
					Alat Tulis Kantor UPT Malioboro	49 jenis	49 jenis		49 jenis		49 jenis		49 jenis		49 jenis			
					Barang Penggandaan Dinas	134,00 lembar	80,600 lembar		80,600 lembar		80,600 lembar		80,600 lembar		80,600 lembar			

				Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis					
				komponen komputer yang tersedia	22 jenis	21 jenis		21 jenis		21 jenis		21 jenis					
				Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 jenis	6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis					
				Bahan Bacaan atau surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis					
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	0 paket	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan					
				Jasa Percetakan	-	6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis					
				Pemeliharaan komputer	-	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis					
				White board	-	1 buah		1 buah		-		-					
				Kursi kerja putar	-	1 buah		1 buah		1 buah		-					

				Meja rapat	-	4 buah		4 buah		-		-		-			
				Kursi rapat	-	10 buah		10 buah		10 buah		-		-			
				Kabinet besi laci 4	-	1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		-			
				Jam dinding	-	0 buah		3 buah		3 buah		-		-			
				Printer	-	1 unit		2 unit		2 unit		-		-			
				tenaga teknis taman	1 orang	-		-		-		-		-			
				Retribusi sampah	12 bulan	-		-		-		-		-			
				Amplop Dinas	4.000 eksemplar	-		-		-		-		-			
				Amplop UPT	1,000 eksemplar	-		-		-		-		-			
				Stopmap Dinas	1.600 eksemplar	-		-		-		-		-			
				Stopmap UPT	400 eksemplar	-		-		-		-		-			
				Jasa Perbaikan peralatan kerja	2 jenis	-		-		-		-		-			
				kompone n Peralatan dan	7 jenis	-		-		-		-		-			

					Perlengkap n kantor													
					Bahan/ peralatan kantor/ rumah tangga	9 jenis	-		-		-		-		-			
					Jasa Pengiriman/ Paket	-	-		-		-		-		-			
					peraturan perundanga n-undangan yang tersedia	-	-		-		-		-		-			
			0 2 0	Kegi atan Penyed iaan Jasa Pengel ola Pelaya nan Perkant oran	Dokumen administrasi penata usaha keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi yang tersusun	5 jenis	5 jenis	73,83 3,958	5 jenis	76,04 8,977	5 jenis	78,33 0,446	5 jenis	80,68 0,359	5 jenis	83,10 0,770		
					Dokumen Administrasi Kepegawaia n yang terkelola	12 doku men ASN	34 doku men ASN		34 doku men ASN		34 doku men ASN		34 doku men ASN		34 doku men ASN			
					Jasa Tenaga bantuan	2 orang	3 oran g		3 oran g		3 oran g		3 oran g		3 oran g			

				SPIP, Profil SKPD)																
Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	092		Program pengembangan dan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	3.000.000 orang	3.150.000 orang	8,327,120,767	3.307.500 orang	8,576,934,390	3.472.875 orang	8,834,242,422	3.649.651 orang	9,099,269,695	3.825.884 orang	9,372,247,785	3.825 orang	8.845 orang	Dinas Pariwisata	Kota Yogyakarta, Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri
		092	001	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	Pengembangan ODTW unggulan	-	7 kali	944,324,900	7 kali	972,654,647	7 kali	1,001,834,286	7 kali	1,031,889,315	7 kali	1,062,845,994				
					Pengembangan jenis dan pemaketan ODTW	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					
					Sadar wisata	-	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali					
					Monitoring dan inventarisasi ODTW	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					
					Pengemb	1 kali	11		11		11		11		11					

					angan kampung wisata		kali		kali		kali		kali				
					Calender event mingguan	52 kali	-		-		-		-				
					Calender event tahunan	1 kali	-		-		-		-				
					Gelar potensi	1 kali	-		-		-		-				
					Sosialisas i Kampung Wisata/Pokd arwis	1 kali	-		-		-		-				
					Workshop Kampung Wisata	1 kali	-		-		-		-				
		0 9 2	0 0 2	Kegiata n Promos i dan Pemas aran Wisata	Analisa pasar wisatawan	-	2 doku men	2,736, 339,7 94	2 doku men	2,818, 429,9 88	2 doku men	2,902, 982,8 87	2 doku men	2,990, 072,3 74	2 doku men	3,079, 774,5 45	
					Pengemb angan jaringan kerjasama pariwisata	-	10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		
					Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	-	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		
					Event pariwisata unggulan	-	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
					Pelayana	2	21		21		21		21		21		

				n informasi pariwisata	jenis	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan				
				Pameran pariwisata	3 kali	-	-	-	-	-				
				Travel dialog	2 kali	-	-	-	-	-				
				Jogja Night Carnival (Pawai Budaya Jogja)	1 kali	-	-	-	-	-				
				Famtrip	1 kali	-	-	-	-	-				
				Jogja Day	1 kali	-	-	-	-	-				
				Pembuatan materi pariwisata	6 jenis	-	-	-	-	-				
				Promosi media massa	3 kali	-	-	-	-	-				
				Pemilihan Dimas Diajeng Kota Yogyakarta	1 kali	-	-	-	-	-				
				Pameran Pariwisata Luar Negeri	1 kali	-	-	-	-	-				
				Promosi media massa Luar Negeri	1 kali	-	-	-	-	-				
				TPO	1 kali	-	-	-	-	-				

					Java Promo	3 kali	-		-		-		-		-			
					Pengiriman Misi Promosi Pariwisata	2 kali	-		-		-		-		-			
					Perikatan kerjasama Pariwisata	2 kali	-		-		-		-		-			
					Penjajagan Pariwisata	2 kali	-		-		-		-		-			
					Workshop dan Seminar Pariwisata	7 kali	-		-		-		-		-			
					Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan	1 kali	-		-		-		-		-			
					Jogja Kreatif	11 kali	-		-		-		-		-			
		092	003	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Malioboro	Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro	80 orang	12 bulan	4,646,456,073	12 bulan	4,785,849,755	12 bulan	4,929,425,248	12 bulan	5,077,308,005	12 bulan	5,229,627,246		
					Pengawasan CCTV	12 bendel laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
					Penyapuan Jl.Ahmad	12 bulan	12 bula		12 bula		12 bula		12 bula		12 bula			

				TIC dan Layanan Pengaduan dan Perijinan	1 paket	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
				Cetak blanko	8 jenis cetak	8 jenis cetak		8 jenis cetak		8 jenis cetak		8 jenis cetak				
				Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2	12 bulan	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen				
				Pengurus Frekuensi Radio Pancar ulang/HT	1 kali ijin	-		-		-		-				
				Pemeliharaan Taman dan Pergola	1 paket	-		-		-		-				
				Pemeliharaan Panggung mobile	1 buah	-		-		-		-				
				Pembinaan PKL	1 kali	-		-		-		-				
				Pembinaan Angkutan Non mesin	1 kali	-		-		-		-				
				Pembinaan Lesehan	1 kali	-		-		-		-				
				Pembinaan seniman	1 kali	-		-		-		-				

				Malioboro														
				Pembinaan guide kawasan Malioboro	1 kali	-		-		-		-		-				
				Laporan hasil kunjungan konsultasi/undangan/promosi	4 laporan konsultasi/undangan	-		-		-		-		-				
		0 9 4		Program Pengembangan Taman Pintar	Jumlah Pengunjung Taman Pintar 800.000 pengunjung	820,000	14,500,000	840,000	14,935,000	860,000	15,383,050,000	880,000	15,844,541,500	900,000	16,319,877,745	900.000 pengunjung berkunjung ke Taman Pintar		Taman Pintar
		0 9 4	0 0 1	Kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	Terlaksana layanan kepada pengunjung Taman Pintar 12 bulan	12 bulan	14,500,000	12 bulan	14,935,000	12 bulan	15,383,050,000	12 bulan	15,844,541,500	12 bulan	16,319,877,745			

L ama ting gal wisa taw an men ingk at	L ama ting gal wisa taw an men ingk at	0 9 3		Progra m Pening katan Kualita s Atraksi Pariwis ata dan Ekono mi Kreatif	Indeks kualitas atraksi pariwisata	80,00	81,5 9	2,188, 489,0 40	83.1 8	2,254, 143,7 11	84.7 7	2,321, 768,0 23	86.3 6	2,391, 421,0 63	87.9 5	2,463, 163,6 95	Inde ks kuali tas atrak si pari wisa ta 87.9 5	Ters ebar se- Kota Yogy akart a
		0 9 3	0 0 1	Kegiata n Pembina aan dan Penge mbang an Ekono mi Kreatif	Pembinaa n Usaha Pariwisata	40 kali	30 kali	680,2 31,00 0	30 kali	700,6 37,93 0	30 kali	721,6 57,06 8	30 kali	743,3 06,78 0	30 kali	765,6 05,98 3		
					Survey Kepuasan Wisatawan	1 Doku men Lapor an	1 lapor an		1 lapor an		1 lapor an		1 lapor an		1 lapor an			
					Pembinaa n SDM Pelaku Pariwisata	40 kali			1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			
					Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata	-	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			
					Jogja Kreatif	-	10 kali		10 kali		10 kali		10 kali		10 kali			
					Festival Ekonomi Kreatif	-			2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
					Gelar	3 kali	2		-		-		-		-			

					potensi ekonomi kreatif		kali										
					Kajian Ekonomi Kreatif	1 kali	-		-		-		-		-		
					Perhitungan lama tinggal wisatawan	1 Dokumen Laporan	-		-		-		-		-		
					Penyusunan Dossier Jogja Kreatif City	1 Dokumen Laporan	-		-		-		-		-		
		093	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	Pentas Kangen Jogja	10 kali	8 kali	1,508,258,040	8 kali	1,553,505,781	8 kali	1,600,110,955	8 kali	1,648,114,283	8 kali	1,697,557,712	
					PMPS	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
					Pentas Kawasan	7 kali	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		
					Event Khusus	40 kali	15 kali		15 kali		15 kali		15 kali		15 kali		
					Pengiriman misi kesenian luar DIY	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
					Pengiriman misi kesenian dalam DIY	1 kali	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		
					Kajian	-	-		1		1		1		1		

				Pengembangan Kualitas Atraksi Pariwisata				dokumen		dokumen		dokumen		dokumen			
				Pentas Atraksi Wisata di kampung wisata	14 kali	-		-		-		-		-			
				FGD Atraksi Wisata	1 kali	-		-		-		-		-			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok:

- a. Masukan (Input)
- b. Keluaran (Output)
- c. Hasil (Outcomes)
- d. Manfaat (Benefits)
- e. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPPARDA Kota Yogyakarta, RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Yogyakarta dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada Tahun 2017-2022 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan Kota Yogyakarta yang semakin meningkat.

Yogyakarta, 28 November 2017

Plt. Kepala Dinas Pariwisata

Sekretaris



Drs. Yuniyanto Dwisutono
NIP. 19660628 198602 1 002